

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Bukit Sundii Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan presiden RI Nomor 24 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Membangun system akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan public tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Materi LkjIp mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran bersangkutan, disamping itu juga LKjIP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LkjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Muaro paneh, Februari 2020
Camat Bukit Sundi

DRS.H.N EFIYARDI
NIP. 196612091993021001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ungkapan puji dan syukur pantas kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa yang dengan segala Rakhmat dan izinnya, pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2019 telah dapat disusun.

Penyusunan LkjiP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat yang mengindikasikan keberhasilan ataupun kegagalan dari misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok tahun Anggaran 2019

Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (Good governance). Komunitas publikpun dapat memiliki pegangan untuk kemudian mengklasifikasikan penilaian atas kinerja Camat.

Penyusunan LkjiP Kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2019 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Laporan kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah

Visi Kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok yaitu : “ **Menjadi Koordinator Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Motivator Pemberdayaan Masyarakat Yang Profesional Dan Handal Guna Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju Dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Tatanan Kehidupan Adat Basandi Syara', Dan Syara' Basandi Kitabullah**”.

Dalam pada itu Ditetapkan pula 5 (lima) Misi untuk mendukung pencapaian Visi dimaksud, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
5. Memelihara kondisi wilayah yang kondusif.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam Tahun 2019 Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan **7 Program dan 18 kegiatan dalam program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok tahun Anggaran 2019.**

Dapat disimpulkan bahwa kantor Camat Bukit Sundi tahun 2019 telah berhasil mencapai sasaran sebesar 88,86 % (dengan klasifikasi pengukuran/penilaian : Sangat Baik

Berbagai keberhasilan Kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok tersebut diatas akan tetap dipertahankan dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. KEWENANGAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	5
C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH	8
D. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. VISI DAN MISI	12
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
C. SASARAN DAN PROGRAM	13
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018	14
F. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	29
BAB IV PENUTUP	33
A. KESIMPULAN	33
B. SARAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Kecamatan Bukit Sundi merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.31 Tahun 2004 dan yang terakhir Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Kecamatan.

Sebagaimana halnya kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, Kecamatan Bukit Sundi masyarakatnya 70 % mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian padi sawah sedangkan yang 30 % lagi dari sektor perdagangan, Pegawai negeri /swasta dan sektor UMKM lainnya.

Dikecamatan Bukit Sundi yang terdapat pasar yang potensial dan merupakan pasar ternak terkenal di Sumatera Barat dan bahkan daerah tetangga seperti propinsi Jambi, Riau serta Sumatera Selatan.

Kecamatan Bukit Sundi mempunyai luas wilayah lebih kurang 10,9 KM² dengan Ibu Kecamatan Muaro Paneh dan secara geografis terletak antara 0,31 Lintang Selatan 1,48 Lintang Utara dan 100,25 Bujur timur 101,41 Bujur Barat dengan ketinggian 490 meter diatas permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kubung
- Sebelah Selatan dengan kecamatan Lembang Jaya
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunung Talang
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Payung Sekaki

Diwilayah Kecamatan Bukit Sundi terdapat 5 (Nagari) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wali nagari yaitu terdiri dari :

- Nagari Muaro Paneh
- Nagari Kinari
- Nagari Bukit Tandang
- Nagari Parambahan
- Nagari Dilam

1.1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2019 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

4. Sebagai bahan umpan balik untuk menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi melalui penerapan Kinerja Instansi pemerintah

LANDASAN HUKUM

Peraturan peraturan yang mendasari penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Bukit Sundi adalah sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
3. Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme.;
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, LKPD kepada DPRD dan informasi LPPD kepada masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi daerah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 sampai Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai 2015;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

1.2. KEWENANGAN ,STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

1.2.1.Kewenangan

Organisasi Kecamatan pada Tahun 2016-2021 mengalami transisi regulasi terkait pembentukan organisasi untuk tahun 2019, organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan, dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Struktur

Organisasi Kecamatan. Untuk Tahun 2019 sampai dengan 2021 Organisasi Kecamatan mengacu kepada Peraturan Daerah kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016, Kecamatan Bukit Sundi merupakan Kecamatan dengan Tipe A. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Dalam hal ini kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut camat yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi Kecamatan Bukit Sundi terdiri dari :

1. Kepala Kecamatan
2. Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
5. Seksi Ekonomi dan pembangunan;
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana
7. Seksi Pelayanan Administrasi terpadu ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan dalam operasionalnya mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten di tingkat Kecamatan / unit pelaksana teknis dinas;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang ada di kecamatan ; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan.

Rincian tugas pokok dan fungsi kecamatan ditetapkan dengan peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Perizinan;
2. Kewenangan Rekomendasi;
3. Kewenangan Pembinaan

4. Kewenangan Pengawasan
5. Kewenangan Fasilitas
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

1.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertiannya bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan sosial
- e. Seksi Ekonomi dan pembangunan
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana
- g. Seksi Pelayanan Administrasi terpadu

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut

1.2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Berikut komposisi pejabat struktural di Kantor Camat Bukit Sundi kondisi 31 Desember 2019:

- Camat : Drs.H.N Efiyardi
- Sekretaris Kecamatan : Syofiar Syam,S.Sos.M.Si
- Kasi Pemerintahan : Zulkifli
- Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial : Arwin.S.Pd
- Kasi Ekonomi Pembangunan : Yunius Salmi.SH
- Kasi Trantib dan Penanggulangan Bencana : Drs.Zul Fadli
- Kasi Pelayanan Administrasi terpadu : Herlianis.S.Sos

- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Dwi Onna.SH
- Pj Kasubag Umum dan Kepegawaian : Ade Indra

Jumlah aparatur Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok keadaan pada tanggal 1 Januari 2019 sebanyak 14 orang dan 3 orang THL dan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebanyak 13 orang dan 3 orang Tenaga harian lepas dengan golongan dan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2019 (orang)	Keadaan 31 Desember 2019(orang)
IV	3	3
III	8	7
II	3	3
I	0	0
Thl	3	3
Jumlah	17	16

- Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2019 (orang)	Keadaan 31 Desember 2019 (orang)
S3	-	-
S2	1	1
S1	9	8
D IV	-	-
D III	-	-
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	5	5
SLTP	1	1
SD	1	1
Jumlah	17	16

1.3. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1.3.1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan

Kekuatan Internal

Berdasarkan hasil analisis dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Bukit sundi Kabupaten solok dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

- Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Sundi Kabupeten Solok berdasarkan perda. Adapun mengenai kedudukan ,tugas pokok dan fungsi tersebut adalah:

Kedudukan :

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah

- b. Susunan kerja di Kecamatan Bukit Sundi yang kondusif , melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individu maupun kelompok.
 - c. Sarana dan prasarana kerja di kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok sangat baik dan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan , sarana transportasi dan peralatan perkantoran
 - d. Hubungan dinamis dalam / dengan masing masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratih,partisipatif atas bawad (top Down) dan bawah atas (Bottom Up)
2. Identifikasi dan analisis Kelemahan
- Kelemahan Internal

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut diantaranya:

1. Kemampuan menggalang stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
2. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat.
3. Kurangnya Sumber daya aparatur, dan perlu di berikan bimbingan teknis untuk setiap aparatur

Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

1. Identifikasi dan Analisis peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai visi dan misinya antara lain:

- a. Perubahan Paradigma Sistim Pemerintahan Demokratis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah,dapat meningkatkan peran Kecamatan Bukit Sundi dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD sehingga memudahkan bagi Kecamatan dalam mengelola keuangan SKPD.
- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Bukit Sundi untuk mamacu dan memotifasi menjawab tantangan dan permasalahan dimasa depan
- d. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, mampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bukit Sundi.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman atau Tantangan

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula ancaman ancaman yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bukit Sundi dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi. Dalam mencapai keberhasilan beberapa tantangan atau ancaman tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor didalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Semakin kritis proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bukit Sundi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya kecamatan menuntut peningkatan SDM Pelayanan di Kecamatan Bukit Sundi
- e. Tuntunan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

1.4. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Sistimatika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2019 sebagai berikut

Bab I – Pendahuluan,

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Bab ini menyajikan tentang ringkasan / ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

Dalam bab ini diuraikan mengenai

A. capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan strandar nasional (jika ada)

5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisa atas efisiensi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV – Penutup,

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi secara teknis bukan hanya sekedar amanat Undang-Undang tetapi juga merupakan tawaran konseptual sekaligus pintu masuk untuk melakukan transaksi gagasan dengan masyarakat dengan tetap berpedoman dan merujuk kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok : **“TERWUJUTNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA’ SYARAK’ BASANDI KITABULLAH”**. Dengan bertitik tolak pada visi dan misi diatas maka dihasilkanlah visi dan misi Kecamatan Bukit Sundi.

1. Visi

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok maka dirumuskan visi Kecamatan Bukit Sundi : Menjadi Koordinator Pemerintah, Pelayan Publik, dan Motivator Pemberdayaan Masyarakat yang Profesional dan handal guna Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Tatahan Kehidupan Adat Basandi Syara’, dan Syarak’ Basabdi Kitabullah”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun misi Kecamatan Bukit Sundi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
5. Memelihara kondisi wilayah yang kondusif.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, maka tujuan pembuatan dokumen perencanaan ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam jangka 5 tahun kedepan yang didasarkan pada permasalahan dan isu strategi dan arah kebijakan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana daerah lebih di tekankan pada tingkat kinerja, baik pada dampak maupun hasil pada satu program kegiatan.

Berikut ini adalah tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dapat digunakan untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan :

Tabel 2.1
Kesesuaian Tujuan dan sasaran

No	Tujuan	Sasaran strategis
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik
2.	Meningkatkan tertib administrasi nagari	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi
3.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1.Pelayanan administrsi perkantoran 2.Peningkatan sarana dan prasarana aparaturn 3.peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.Pemeliharaan Kantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi	1.Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari 2.Peningkatan SDM dan Kelembagaan nagari.
3	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	1.Perencanaan pembangunan daerah

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran dan inidikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PENGUKURAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Indeks kepuasan masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti/jumlah pengaduan masyarakat x 100 %
		3. Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan trantibmas yang ditindak lanjuti / jumlah gangguan trantibmas yang terjadi X 100 %
2	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan nagari	1. persentase nagari dengan pelaporan AND tepat waktu	Jumlah nagari dengan pelaporan AND tepat waktu/jumlah nagari X 100 %
		2. persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu	Jumlah nagari yang menetapkan APB tepat waktu/jumlah nagari X 100 %
3	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase usulan musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	Jumlah usulan yang tertampung dalam dokumen RKPD / Jumlah usulan dalam musrenbang kecamatan X 100 %
		2. Persentase capaian PAD	Realisasi capaian PAD / target X 100 %

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Pada dasarnya Perjanjian kinerja tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Camat Bukit Sundi Kabupaten Solok selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis/sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan	2. Indeks kepuasan masyarakat	3,35

	masyarakat terhadap pelayanan public		
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	70,00
		3. Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti	75 %
2	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan nagari	1. persentase nagari dengan pelaporan AND tepat waktu	100 %
		2. persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	1. Persentase usulan musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	80 %
		2. Persentase capaian PAD	80 %

2.4. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi

PENETAPAN KINERJA KECAMATAN BUKIT SUNDI

TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	3,35	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan	1.500.000 17.723.258 2.500.000 20.000.000 5.000.000	

					Alat tulis Kantor	3.175.000	
					5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.250.000	
					6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000	
					7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	
					8. Penyediaan Makanan dan Minuman	61.620.000	
					9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16.000.000	
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	77.300.000	
					1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000	
					2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		
					3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		
				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.500.000	
				Program Pemeliharaan kantibnas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	15.500.000	
2	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam	2. Persentase nagari tertib administrasi	100%	Program Peningkatan keberdayaan	Pemberdayaan lembaga dan organisasi	165.300.000	

	penataan nagari	keuangan dan pemerintahan		masyarakat pedesaan/nagari	masyarakat pedesaan		
				Program peningkatan SDM dan kelembagaan nagari	Pembinaan lembaga pemerintahan nagari	18.750.000	
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	3. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD dan persentase capaian PAD	80%	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	4.270.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok selaku perangkat daerah, melaksanakan kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Kinerja. Laporan tersebut diatas memberikan Gambaran Mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan pedoman penyusunan PeLaporan Kinerja, Kinerja Kecamatan Danau Kembar diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran Program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian kinerja Program/ kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kinerja kegiatan yang terdiri dari input, proses, output, outcome, benefit, dan impact.

1.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. **Indikator Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*Benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*Impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

1.3. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran

Evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dan pelaksanaan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian program dan kajian serta sasaran didasarkan nilai capaian kinerja tersebut.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dengan tujuan pencapaian sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian diukur menggunakan klasifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

Sumber : Bahan ajar Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat

1.4. Hasil pengukuran perjanjian kinerja organisasi tahun 2019

Tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Sundi untuk Tahun 2019 berdasarkan sasaran diukur menurut target dan realisasi pencapaian dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator Kegiatan/Output/Keluaran	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,35	3.40	100,89
		Program Pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	70	100	
		Program Pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Gangguan trantibmas yang ditindak lanjuti	%	75	100	133
2.	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi nagari	Program Peningkatan SDM dan kelembagaan nagari	Persentase nagari tertib administrasi	%	100	100	100
		Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari	Persentase kegiatan daerah yang diikuti	%	100	100	100
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masy yang tertampung dalam dok perencanaan	%	80	93,75	117,18
			Persentase capaian PAD	%	80	37,69	47,11

Realisasi indikator kinerja dihitung menggunakan formula/rumus sebagai berikut :

❖ Sasaran strategis : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

I.Indikator kinerja 1 : Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)

Indikator kepuasan masyarakat didapat dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan RB seKretariat Daerah Kab Solok pada tahun 2019. Dimana Kantor camat Bukit Sundi mendapatkan nilai 3.40 dengan predikat Baik.

II. Indikator kinerja 2 : persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel II.I

Target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	80 %	100%	125

Dilihat dari table diatas, capaian Indikator kinerja untuk persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kecamatan Bukit Sundi tahun 2019 berupa laporan laporan dari masyarakat terkait masalah ketentraman dan ketertiban umum serta laporan bencana alam. Salah satu bentuk tindak lanjut dari kecamatan adalah penyelesaian dilapangan dan meneruskan kepada pihak terkait/berwenang. Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti selama tahun 2019 diantaranya :

- a. Laporan Bencana Angin Kencang di jorong koto panjang nagari Muaro paneh yang menyebabkan kerusakan bangunan rumah penduduk dan instalasi listrik serta terjadinya gangguan terhadap kelancaran lalulintas di Muaro Paneh menuju cupak atau sebaliknya. Kejadian ini sudah di laporkan secara tertulis ke Bupati Solok untuk bisa ditindak lanjuti oleh BPBD Kab. Solok.
- b. Laporan Kebakaran di Dusun Balai Gadang Cubagan Jorong koto panjang Nagari mauro Paneh yang melanda 2 (dua) unit rumah warga dan ditindak lanjuti dengan upaya pemadaman bersama masyarakat dibantu dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Solok dan Kota Solok setelah itu membuat laporan kepada Bupati Solok dengan tembusan kepada BPBD Kab. Solok dan Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- c. Laporan Kegiatan Balapan liar di sepanjang jalan Kinari – Kubang Nan Duo yang dapat membahayakan pengguna jalan raya. Laporan ini ditindak lanjuti dengan melakukan patroli keamanan gabungan bersama Polsek Bukit Sundi ke Lokasi balapan liar di Nagari Kinari.
- d. Laporan Pengeroyokan oleh sekelompok orang yang menimpa salah seorang warga muaro paneh yang beralamat di dusun sawah suduik jorong balai pinang yang mengakibatkan luka tusukan di bagian perut. Laporan ini di tindak lanjuti dengan mengeluarkan Instruksi kepada warga untuk mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

- e. Laporan Bencana Alam Banjir di Nagari Muaro Paneh yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum serta runtuhnya tebing tepi sungai dan bangunan irigasi, Laporan ini ditindak lanjuti dengan melakukan kunjungan lapangan dan membuat laporan tertulis kepada BPBD Kab. Solok untuk ditindak lanjuti lebih lanjut.
2. Perbandingan relisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan 2018 dan beberapa tahun terakhir

Tabel II.2

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

No	IKU	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	100%	100%	100%	125%	125%	125%

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) presentase gangguan trantibmas yang tertanganitetap stabil/baik dari tahun ke tahun.

Data gangguan di Kecamatan Bukit Sundi tahun 2017,2018,2019 sebagai berikut :

1. Tahun 2017 sebanyak 4 gangguan:
 - a. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - b. Banjir di muaro paneh
 - c. Coranmor di muaro paneh
2. Tahun 2018 sebanyak 6 gangguan :
 - a. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - b. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - c. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - d. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - e. Banjir di muaro paneh
 - f. Banjir di muaro paneh dan kinari
3. Tahun 2019 sebanyak 5 gangguan :
 - a. Bencana Angin Kencang di jorong koto panjang nagari Muaro paneh
 - b. Laporan Kebakaran di Dusun Balai Gadang Cubagan Jorong koto panjang Nagari mauro Paneh
 - c. Laporan Kegiatan Balapan liar di sepanjang jalan Kinari – Kubang Nan Duo
 - d. Laporan Pengeroyokan (Begal) di Nagari Muaro Paneh
 - e. Laporan Bencana Alam Banjir di Nagari Muaro Paneh

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjutii :

- Baiknya koordinasi Kecamatan Bukit Sundi dengan Forkompincam dan masyarakat di Kecamatan Bukit Sundi dalam menangani setiap kejadian/masalah trantibmas yang terjadi di Kecamatan Bukit Sundi.
- Cepat tanggap dan sigap dalam menanggulangi setiap kejadian/masalah trantibmas yang terjadi di Kecamatan Bukit Sundi
- Adanya anggaran yang mendukung untuk kegiatan ini berupa penggantian transport untuk Forkompincam dan tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Tabel II.3

Tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	70%	100%	142%	Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	15.500.000,-	14.059.000,-	90,70 %
			RATA-RATA CAPAIAN			142%	TOTAL PER SASARAN	15.500.000,-	14.059.000,-	90,70 %
TINGKAT EFISIENSI = 9,3 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS = 156,56 %										

Tahun Anggaran 2019, tingkat efisiensi capaian kinerja dari indicator persentase pengaduan masyarakat yang diitindak lanjuti mencapai 9,3 % sedangkan efektifitasnya sebesar 156,56%. Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bukit Sundi naik dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Sedangkan untuk jumlah ASN yang ada di Kecamatan Bukit Sundi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun awal tahun 2019 berjumlah 17 menjadi menjadi 16 orang namun dengan keterbatasan sumber daya aparatur Kecamatan Bukit Sundi dapat melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2019

5. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun selanjutnya diharapkan program/kegiatan ini tetap ada dan dianggarkan dengan jumlah pendanaan yang lebih baik, sehingga apapun kejadian gangguan trantibmas yang terjadi di Kecamatan Bukit Sundi dapat tertatasi.

III. Indikator kinerja 3 : Persentase gangguan yang ditindak lanjuti

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel III.1

Target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Persentase gangguan trantibmas yang ditindak lanjuti	%	75 %	100%	133

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel III.2

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

No	IKU	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Persentase gangguan kantrantibmas yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	100%	100%	100%	125%	125%	125%

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) presentase gangguan trantibmas yang tertanganit tetap stabil/baik dari tahun ke tahun.

Data gangguan di Kecamatan Bukit Sundi tahun 2017,2018,2019 sebagai berikut :

1. Tahun 2017 sebanyak 4 gangguan:
 - a. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - b. Banjir di muaro paneh
 - c. Curanmor di muaro paneh
2. Tahun 2018 sebanyak 6 gangguan :
 - a. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - b. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - c. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - d. Kebakaran rumah warga di Muaro Paneh
 - e. Banjir di muaro paneh
 - f. Banjir di muari paneh dan kinari

3. Tahun 2019 sebanyak 8 gangguan :
 - a. Kebakaran di dusun Batu Manggaga jorong Sawah Ampang
 - b. Kebakaran di cubagan jorong koto panjang
 - c. Angin putting beliung di perhentian bendi Jrg Koto Panjang
 - d. Banjir di kinari dan Muara Panas
 - e. Maling motor di mesjid raya Muara panas
 - f. Maling ternak di Nagari Dilam
 - g. Geng motor di sawah sudut Jorong Balai Pinang Nag. Muara Panas
 - h. Geng Motor di jorong Bungo harum nagari kinari

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif yang telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan persentase gangguan trantibmas yang tertangani :

- Baiknya koordinasi Kecamatan Bukit Sundi dengan Forkompincam dan masyarakat di Kecamatan Bukit Sundi dalam menangani setiap kejadian/masalah trantibmas yang terjadi di Kecamatan Bukit Sundi.
- Cepat tanggap dan sigap dalam menanggulangi setiap kejadian/masalah trantibmas yang terjadi di Kecamatan Bukit Sundi
- Adanya anggaran yang mendukung untuk kegiatan ini berupa penggantian transport untuk Forkompincam dan tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Tabel III.3

Tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti	%	75%	100%	133%	Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	15.500.000,-	14.059.000,-	90,70 %
			RATA-RATA CAPAIAN			133%	TOTAL PER SASARAN	15.500.000,-	14.059.000,-	90,70 %
TINGKAT EFISIENSI = 9,3 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS = 146,63 %										

Tahun Anggaran 2019, tingkat efisiensi capaian kinerja dari indikator Persentase gangguan trantibmas yang ditindaklanjuti mencapai 9,3 % sedangkan efektifitasnya sebesar 146,63%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bukit Sundinaik dibandingkan

tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Sedangkan untuk jumlah ASN yang ada di Kecamatan Bukit Sundi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun awal tahun 2019 berjumlah 17 menjadi menjadi 16 orang namun dengan keterbatasan sumber daya aparatur Kecamatan Bukit Sundi dapat melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2019

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel III.4

No	IKU	Program/Kegiatan
1	Persentase gangguan kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Program Pemeliharaan trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal : <i>Kegiatan ;</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Pada Tahun 2019, Program/Kegiatan ini menunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU persentase gangguan trantibmas yang tertangani di Kecamatan Bukit sundi

6. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun selanjutnya diharapkan program/kegiatan ini tetap ada dan dianggarkan dengan jumlah pendanaan yang lebih baik, sehingga apapun kejadian gangguan trantibmas yang terjadi di Kecamatan Bukit Sundi dapat tertatasi.

Anantara IKU II dan IKU III terdapat kesamaan disebabkan karena laporan pengaduan masyarakat pada umumnya berhubungan dengan gangguan kantrantibmas yang terjadi di masyarakat.

❖ **Sasaran strategis : Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan adminsitras**

I. Indikator kinerja 1 dan 2 : persentase nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu dan persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019

Tabel I

Target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi	Peningkatan keberdayaan masyarakat desa/nagari	% nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu dan % nagari yang menetapkan APB tepat waktu	%	100 %	100%	100

Dilihat dari tabel diatas, capaian indikator kinerja untuk persentase pelaporan ADN dan Penetapan APB nagari di kecamatan Bukit Sundi tahun anggaran 2019 telah sesuai/ berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan target sebesar 100 dapat direalisasikan sebesar 100 %. Disamping Indikator utama ini ada indikator kegiatan kegiatan daerah yang diikuti Kecamatan Bukit Sundi selama Tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah kegiatan-kegiatan daerah yang ada selama Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

- a. Peringatan Hari Jadi Kab.Solok ke-106 di THKW Arosuka April 2018
- b. Kegiatan Jambore TP-PKK se Kab.Solok di Koto Baru
- c. Pemilihan Uda-Uni Kab.Solok Tahun 2018
- d. Peringatan HUT-RI ke 74 di Lapangan limau puruik pada tanggal 17 Agustus 2019
- e. Pemilihan Duta wisata Kab.Solok 2018

Dari 5 (lima) even bergengsi tersebut, Kecamatan Bukit Sundi dapat mengikuti keseluruhannya dengan baik.

2.Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 2

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

No	IKU	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Persentase nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu dan persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) presentase Nagari dengan pelaporan ADN tepat Waktu dan Nagari yang Menetapkan APB tepat waktu sesuai target dan realisasinya hal ini disebabkan dari 5 (lima) nagari yang ada di Kecamatan bukit Sundi selalu tepat waktu menyampaikan laporan ADN dan menetapkan APB Nagari sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tim Monev Kecamatan banyak membantu dalam membina dan menata administrasi Pemerintah Nagari sehingga penyampaian laporan ADN dan penetapan APB Nagari dapat ditetapkan sesuai dengan jadwal.

3.Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan daerah yang diikuti adalah sebagai berikut :

- Adanya anggaran yang mendukung untuk kegiatan ini di DPA Kec.Bukit Sundi melalui kegiatan PLO dan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan TP-PKK

- Baiknya koordinasi dengan semua pihak dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Tabel 3

Tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi nagari	Persentase nagari dengan pelaporan ADN Tepat waktu dan Persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu	%	100%	100%	100%	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari	165.300.000,-	137.980.100,-	83,47 %
		Program peningkatan SDM dan kelembagaan nagari					18.750.000,-	12.130.000	64,69 %	
			RATA-RATA CAPAIAN			100%	TOTAL PER SASARAN	184.050.000,-	150.110.100,-	81,56 %
TINGKAT EFISIENSI = 18,44 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS = 122,60 %										

Tahun Anggaran 2019 tingkat efisiensi capaian kinerja dari indikator Persentase nagari dengan pelaporan ADN Tepat waktu dan Persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu mencapai 18,44 % sedangkan efektifitasnya sebesar 122,60 %. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bukit Sundi naik dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan daerah. Sedangkan untuk jumlah ASN yang ada di Kecamatan Bukit Sundi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun awal tahun 2019 berjumlah 17 menjadi menjadi 16 orang namun dengan keterbatasan sumber daya aparatur Kecamatan Bukit Sundi dapat melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2019

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
1	Persentase nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu dan persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program peningkatan SDM dan kelembagaan nagari <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga pemerintahan nagari

Pada Tahun 2019, Program/Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU persentasenagari dengan pelaporan ADN tepat waktu dan persentase nagari yang menetapkan APB tepat waktu.

6.Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun selanjutnya diharapkan program/kegiatan ini tetap ada dan dianggarkan dengan jumlah pendanaan yang lebih baik, sehingga setiap kegiatan daerah yang ada dapat diikuti oleh Kecamatan bukit sundi.

❖ Sasaran Strategis : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Indikator Kinerja 1 : Persentase usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD

1.Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 1

Target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari	% usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	%	80	93,75	117,18

IKU ini 93,75% yang didapatkan dari jumlah usulan masyarakat yang tertampung dalam dokumen perencanaan dibandingkan dengan jumlah usulan yang ada, untuk Tahun 2019 ada sekitar 15 usulan masyarakat yang tertampung dari total 42 usulan kecamatan, sementara target kinerja sebanyak 16 usulan.

2.Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

No	IKU	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	% usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	75%	75%	80%	100	87,5	93,75	100	87,5	93,75

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Tertampung dalam Dokumen RKPD tidak dapat terealisasi dari target yang ditetapkan karena keterbatasan anggaran Pemerintah daerah sehingga tidak semua usulan yang ditetapkan dalam Musrenbang Kecamatan dapat di tampung dalam dokumen RKPD.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Untuk indikator ini keberhasilannya ataupun kegagalannya disebabkan belum tertampungnya seluruh usulan dari kecamatan. Diharapkan pada tahun 2020 dan tahun berikutnya semua usulan dari kecamatan bisa ditampung semuanya.

Usulan Musrenbang tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut :

1. Tahun 2017 usulan dari kecamatan sebanyak 159 usulan dan jumlah usulan yang tertampung sebanyak 18 usulan. (11,32%)
2. Tahun 2018 usulan dari kecamatan sebanyak 42 usulan dan jumlah yang tertampung sebanyak 14 usulan dari target sebanyak 16 Usulan
3. Tahun 2019 usulan dari kecamatan sebanyak 42 usulan dan jumlah yang tertampung sebanyak 15 usulan dari target sebanyak 16 usulan

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Tabel 3

Tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	%	80%	93,75 %	117,18%	Program perencanaan pembangunan daerah	4.270.000,-	4.260.000,-	99,76 %
			RATA-RATA CAPAIAN			117,18%	TOTAL PER SASARAN	4.270.000,-	4.260.000,-	99,76%
TINGKAT EFIISIENSI = 0,24 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS = 117,46 %										

Tahun Anggaran 2019 tingkat efisiensi capaian kinerja dari indikator Persentase Usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD mencapai 0,24 % sedangkan efektifitasnya sebesar 117,46 %, Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Bukit Sundinaik dibandingkan tahun sebelumnya hal ini diakibatkan oleh kebijakan

daerah. Sedangkan untuk jumlah ASN yang ada di Kecamatan Bukit Sundi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun awal tahun 2019 berjumlah 17 menjadi menjadi 16 orang namun dengan keterbatasan sumber daya aparatur Kecamatan Bukit Sundi dapat melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2019.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	IKU	Program/Kegiatan
	% usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari : <i>Kegiatan</i> ; • Pelaksanaan Musrenbang RKPD

6. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk Tahun mendatang tetap akan melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan untuk menampung usulan masyarakat dan diprioritaskan masuk dalam dokumen RKPD dan kegiatan musrenbang ini akan dilaksanakan lebih tepat waktu dan dapat menghadirkan seluruh stakeholder yang terlibat.

Indikator Kinerja : Persentase Capaian PAD

1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 1

Target dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Kinerja						
	Sasaran	Program	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari	Persentase capaian PAD	%	80% (Rp.27.860.800)	37,69% (Rp.10.500.000)	37,69

Dilihat dari tabel di atas, capaian Indikator kinerja untuk prosentase capaian PAD tidak terrealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah yang dihimpun dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) realisasinya capaian targetnya kurang dari 50 %. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB yang administrasinya dimulai dari Wali Nagari setempat.

2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

No	IKU	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Persentase capaian target PAD	80 % 25,328.000	80% 27.860.800	80% 27.860.800	56,33 14.775.000	30,96% 8.625. 000	37,69 % 10.50 0.000	56,33	30,96	37,69

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) presentase pencapaian target retribusi/PAD kurang baik dari tahun sebelumnya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB karena tidak adanya sosialisasi tentang pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Rekapitulasi penerimaan IMB Tahun 2017, 2018, 2019:

1. Tahun 2017 sebanyak 12 bh IMB Rp. 14.775.000

2. Tahun 2018 sebanyak 8 bh IMB Rp. 8.625.000

3. Tahun 2018 sebanyak 11 bh IMB Rp. 10.500.000

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan pencapaian target PAD :

- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- ✓ Kurangnya sosialisasi akan manfaat pengurusan IMB bagi masyarakat.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2019

Tabel 3

Tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	Persentase capaian PAD	%	80%	37,69 %	47,11 %				
			RATA-RATA CAPAIAN			47,11%	TOTAL PER SASARAN			
TINGKAT EFISIENSI =										
TINGKAT EFEKTIFITAS =										

Tahun Anggaran 2019 tingkat efisiensi dan efektifitas dari indicator persentase capaian PAD tidak bias diukur karena tidak terdapat program kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja dari indicator tersebut.

6. Realisasi Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Akuntabilitas keuangan Tahun 2019 pada Kantor Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Table 3.5

AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	15.484.300	12.500.000	15.500.000	15.454.300	11.520.000	14.059.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	211.728.750	276.621.958	239.768.258	200.219.120	258.210.700	207.913.722
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.392.258	59.163.000	96.300.000	173.114.950	50.788.838	95.118.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	15.765.700	500.000	12.500.000	9.689.000	495.000	12.000.000
		Program perencanaan pembangunan daerah	11.693.000	7.7063.300	4.270.000	8.693.600	7.063.300	4.260.000
2	Penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya sesuai falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari	96.553.500	344.575.000	165.300.000	96.459.800	259.418.600	137.980.100

	Kitabullah						
		Program peningkatan SDM dan kelembagaan Nagari	144.000.00 0	14.000.000		113.976.200	0
		Program sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	91.021.000	57.000.000		90.976.700	33.938.500

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan Kecamatan Bukit Sundi tersedia anggaran belanja dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja	1.027.774.082	913.260.822	88,86
	Belanja Tidak Langsung	475.385.824	429.800.000	90,41
	- Belanja Pegawai			
	Belanja Langsung			
	- Belanja Pegawai	36.000.000	36.000.000	100
	- Belanja Barang dan Jasa	445.138.258	379.028.322	85,15
	- Belanja Modal	71.250.000	68.432.500	96,05

Untuk lebih jelasnya penyerapan anggaran di Kecamatan Bukit Sundi Tahun Anggaran 2019, maka dapat dilihat pada realisasi belanja masing-masing program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Realisasi Belanja Program dan Kegiatan

Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	17.723.258	12.906.371	72,82
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	2.500.000	1.345.250	53,81
	d. Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	19.700.000	98,50

	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000	4.995.000	99,90
	f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.175.000	3.100.000	97,64
	g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	73.250.000	70.432.500	96,15
	h. Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	24.580.000	81,93
	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	25.000.000	7.754.600	31,02
	j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	61.620.000	61.600.000	99,97
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.000.000	15.993.000	99,96
	b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.300.000	77.300.000	100
	c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	3.000.000	60,83
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	- Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja/keuangan	12.500.000	12.000.000	96
4.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari			
	- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	165.300.000	137.980.100	83,47
5.	Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal			
	-Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	15.500.000	14.059.000	90,70

6	Peningkatan SDM dan Kelembagaan Nagari -Pembinaan Lembaga pemerintahan nagari	18.750.000	12.013.000	
8.	Perencanaan pembangunan daerah - Pelaksanaan Musrenbang RKPD	4.270.000	4.260.000	99,77

Kecamatan Bukit Sundi dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dan efektif dalam melakukan kegiatannya. Efisien dan Efektifitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi Output dengan Realisasi Input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan.

B A B I V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Bukit Sundi sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Bukit Sundi dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari, belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM yang ada.
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Perangkat Nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- Mengadakan pembinaan administrasi Nagari secara bertahap di 5 Nagari se Kecamatan Bukit Sundi

B. SARAN

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Bukit Sundi selama tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil *sangat baik*, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2020. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2019 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi tahun 2019 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

